

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Pelaporan Kinerja ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Implementasinya bagi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau merupakan perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan dalam tahun anggaran 2020.

Secara umum seluruh sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Stratejik dapat tercapai dengan realisasi/target 100%.

B. Langkah Perbaikan

Untuk lebih meningkatkan keberhasilan dalam pencapaian target Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, ke depan berupaya untuk mengatasi masalah serta kendala yang ada, dengan kiat pemecahan sebagai berikut:

1. Berupaya semaksimal mungkin mendorong dan meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur dalam memahami tugas pokok dan fungsinya masing-masing dengan memberikan kesempatan bagi staf/Pelaksana maupun Pejabat Ezelon III dan IV untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan dalam implementasi tuntutan Organisasi.

2. Meningkatkan jumlah pegawai yang ada dengan kualifikasi pendidikan sesuai kebutuhan organisasi.
3. Berusaha memaksimalkan pelayanan serta memperluas cakupan sasaran sehingga semakin mendekati terwujudnya pelayanan prima terhadap masyarakat maupun Pelayanan Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah.
4. Melakukan pembinaan secara terus menerus kepada staf dan mendorong staf untuk meningkatkan kinerja, disiplin dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan agar sasaran yang ingin dicapai dapat dilaksanakan dengan baik, benar dan lancar.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Malinau. Dengan harapan sebagai alat kendali dan penilaian kualitas kinerja sekaligus sebagai media transparansi publik, namun demikian masih perlu penyempurnaan sehingga selaras dengan perkembangan keadaan dan kondisi.

Malinau, 20 Januari 2021

Kepala BPKD,

Dr. Dumberbril, SE., MM

Pembina TK.I/IVb

NIP. 1969 0314 20012 1 001